

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) PADA
PERMUKIMAN KUMUH DI DESA KOTO BARU KEC.
KOTO BARU KOTA SUNGAI PENUH**

**MESI SULASTRI, S.AP¹,
EFENDI, S.Sos., M.Si², EMILYA GUSMITA, S.Sos., M.Pd³**

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email :

mesisulastri980@gmail.com

efendi@gmail.com

emilyagusmita@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of the City Without Slum Program (Kotaku) in Slum Settlements in Koto Baru Village, Koto Baru Subdistrict, Sungai Penuh City. Department of Public Administration, Archipelago Sakti College of Administrative Sciences (STIA-NUSA). 2020. The purpose of this study is to determine how the implementation process of the city program without slum (KOTAKU) in slum settlements in the village of Koto Baru, kec. New Koto full river town. The informants in this study were the Head of Settlement Development (PERKIM) for Sungai Penuh City, the Head of Koto Baru Village, the Secretary of Koto Baru Village and the BPD of Koto Baru Village. The data collection tool used in this study was a list of questions in the form of an interview guide. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. There are 4 stages used to carry out slum area management activities, including: the socialization stage, the planning stage, the implementation stage and the evaluation stage. The method used in this research is qualitative research methods. The results showed that the implementation process of the KOTAKU program was carried out according to the stages, where at the socialization stage it was seen that the community seemed enthusiastic in welcoming the KOTAKU program, the planning stage was carried out by involving the community by considering environmental conditions, so it was agreed that the development priorities were Environmental Drainage and Environmental Roads. In the process of implementing / working on this project, it runs in accordance with the work concept that has been discussed by involving the community, while in the evaluation stage the activities are carried out openly, every community may attend when an evaluation meeting is held.

Keyword : Implementation, Program Without Slums (KOTAKU), Settlement Slums.

ABSTRAK

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Pada Permukiman Kumuh Di Desa Koto Baru Kec.Koto Baru Kota Sungai Penuh. Jurusan Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara sakti (STIA-NUSA). 2020. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Pada permukiman kumuh di Desa Koto Baru Kec. Koto Baru Kota Sungai Penuh. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Kasi Pengembangan Permukiman (Dinas PERKIM) Kota Sungai Penuh, Kepala Desa Koto Baru, Sekretaris Desa Koto Baru dan BPD Desa Koto Baru. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

merupakan daftar pertanyaan dalam bentuk pedoman wawancara. Teknis analisis data yang digunakan yaitu dengan Reduksi data, Penyajian data, Menarik kesimpulan. Terdapat 4 tahap yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan penataan kawasan kumuh, diantaranya : tahap sosialisasi, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi program KOTAKU berjalan sesuai dengan tahapan, dimana pada tahap sosialisasi terlihat masyarakat nampak antusias dalam menyambut program KOTAKU, tahapan perencanaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan maka disepakati prioritas pembangunan adalah Drainase Lingkungan dan Jalan Lingkungan. Pada proses tahapan pelaksanaan/pengerjaan proyek ini berjalan sesuai dengan konsep kerja yang telah dimusyawarahkan dengan melibatkan masyarakat, sedangkan pada tahapan evaluasi kegiatan dilakukan secara terbuka, setiap masyarakat boleh menghadiri ketika diadakan rapat evaluasi.

Kata kunci : Implementasi, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Permukiman Kumuh

I. PENDAHULUAN

Program KOTAKU bermaksud untuk membangun system yang terpadu untuk penanganan kawasan kumuh, Dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasi nya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Program KOTAKU di harapkan menjadi platfon kolaborasi yang mendukung penanganan kawasan kawasan permukiman kumuh seluas 23.656 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat,serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 20015-2019 yaitu pengatasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Menurut Adi Sasmita (2010) kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap, tingkah laku dan pola sosial budaya yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Kumuh di artikan sebagai daerah dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang di tempati oleh penduduk dengan status ekonomi rendah dengan dangunan-bangunan perumahan yang tidak memenuhi syarat untuk di sebut sebagai hunian-hunian yang sehat. Dengan kata lain, kumuh di artikan sebagai tanda atau pandangan yang di berikan golongan menengah keatas terhadap golongan bawah.

Menurut Sinulingga (2005) ciri-ciri kampung/permukiman kumuh terdiri dari:

1. Penduduk sangat padat antara 250-400 jiwa/Ha. Pendapat para ahli perkotaan menyatakan bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah mencapai 80 jiwa/ha maka timbul masalah akibat kepadatan ini, antara perumahan yang di bangun tidak mungkin lagi memiliki persyaratan fisiologi, psikologis dan perlindungan terhadap penyakit.
2. Jalan-jalan sempit tidak dapat di lalui oleh kendaraan roda empat, karena sempit nya, kadang kadang jalan ini sudah di balik atap-atap rumah yang sudah bersinggung satu sama lain.
3. Fasilitas drainase sangat tidak memadai, dan malahan bisa terdapat jalan-jalan tanpa drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah akan tergenang oleh air.

4. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Ada di antaranya yang langsung membuang tinjanya ke saluran yang dekat dengan rumah.
5. Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim. Manfaat air sumur diangkat, air hujan atau membeli secara kelengan.
6. Tata bangun sangat tidak teratur dan bangunan-bangunan pada umumnya tidak permanen dan malahan banyak yang sangat darurat.
7. Pemilik hak atas lahan sering legal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah Negara dan para pemilik tidak memiliki status apa-apa.

Usaha pemerintah dalam menangani permukiman kumuh (*slum area*) salah satunya adalah dengan dilakukan dengan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Hal tersebut tertulis dalam Surat Edaran Kementerian PUPR No. 40/SE/DC/2016 tentang pedoman umum program Kota Tanpa Kumuh. Program Kotaku ini dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten 34 Propinsi. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pada kawasan kumuh melalui kegiatan pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi guna keberlanjutan masyarakat di permukiman kumuh (Apriliana, 2018).

Program Kota tanpa kumuh menekankan peran Pemerintah Daerah sebagai nahkoda yang memegang kunci dalam mengarahkan dan mensinergikan segala bentuk kolaborasi antar pihak untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, terutama masyarakat sebagai subyek pembangunan yang aktif. Rencana yang dibuat tidak hanya berdasarkan pada penyelesaian masalah saat ini tetapi harus dilandaskan pada pencapaian visi penataan permukiman untuk mencapai Kabupaten/Kota Layak Huni dan disesuaikan dengan visi Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana pembangunan lainnya. Dalam Struktur Organisasi KOTAKU di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan program adalah Lurah/Kades dan perangkatnya, BKM/LKM dan perangkatnya, Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Permukiman, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan Relawan. Program KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan.

kawasan kumuh di provinsi yang ada di Indonesia, telah memperlihatkan betapa masih banyak nya kawasan kumuh di Indonesia yang sangat perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat. Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang juga masuk kedalam kawasan kumuh di Indonesia berdasarkan data Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat(PURP) kawasan kumuh pada provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh yaitu sebagai berikut:

1. Provinsi Jambi berjumlah 685,01 Ha wilayah kumuh
2. Kota Sungai Penuh berjumlah 331,90 Ha wilayah kumuh
3. Pusat pemukiman berjumlah 25,81 Ha wilayah kumuh

Melalui program kota tanpa kumuh provinsi jambi telah melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Umum Dan Perumahan Rakyat(RUPR) dalam rangka percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh.

pengimplementasikan program KOTAKU di Desa Koto Baru Kota Sungai Penuh menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan revitalisasi di lingkungan tersebut, karena pemerintah berusaha meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujud nya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. desa koto baru memiliki permasalahan infrastruktur yang masih kurang memadai dan masih tidak layak untuk di gunakan yaitu :

1. Kepadatan bangunan masih tinggi.
2. Kualitas bangunan tidak layak huni.

3. Jaringan jalan lingkungan sempit pada beberapa kawasan.
4. Kondisi jalan rusak.
5. Drainase tersumbat.
6. Drainase yang ada terhalang bangunan warga/bangunan berada di atas drainase.
7. Sarana fasilitas umum yang di gunakan bersama oleh keluarga untuk keperluan mandi,mencuci,dan buang air MCK (mandi,cuci,kakus).

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang di gunakan

Pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan data data yang telah dihimpun yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang didapat dari fenomena lapangan yang bersifat empiris guna menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian.

Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.

Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kasi Pengembangan Permukiman Dinas Perkim 1 orang, Kepala Desa Koto Baru 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang,dan Anggota BPD 5 orang.

Data Yang Di Ambil

1. Data primer
Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian, yaitu melalui berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. di didapat kan yaitu, Surat Ederan Direktur Jendral Cipta Karya No. 40/SE/DC/2016, dari buku.

Teknik Yang Digunakan

1. Teknik wawancara
2. Teknik observasi
3. Dokumentasi

Unit analisis

Unit Analisis dalam penelitian adalah Lembaga yakni Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Alat pengumpulan data

Adapun alat yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pedoman wawancara
2. Pensil dan pena
3. Kertas
4. Laptop
5. Smartphone

Analisis data

Sugiyono 2010:244 dalam menganalisis data kualitatif, ada tiga cara yaitu:

1. Reduksi Data (*ReductionData*)

reduksi data dapat diartikan sebagai tahap merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pelaksanaan penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data (*DataDisplay*).

Dalam penelitian ini maka peneliti menyajikan data dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis, data tersebut berupa hasil wawancara yang dilakukan di Di desa koto baru, kepala Desa koto baru ketua Bpd koto baru, serta masyarakat dikuti dengan menyajikan bagan, tabel, dokumen-dokumen dan foto atau gambar sejenisnya untuk memperjelas data tersebut sehingga nantinya akan dapat mempermudah peneliti untuk menarik suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*ConclutingDrawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan adanya kesimpulan maka penulis dapat mengetahui sejauh mana koordinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa koto baru dalam mengatasi pemukiman kumuh didesa koto baru sehingga peneliti dapat mengetahui inti dari setiap kegiatan yang dilakukan.

Teknik Triagulasi

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik triangulasi Teknik triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informan melalui proses wawancara dan studi dokumentasi. Hasil wawancara dan studi dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan dan kepercayaan yang sesuai. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian. Agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diangkat maka peneliti mengambil lokasi penelitian di desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Kotaku Tanpa Kumuh (KOTAKU) Pada Permukiman Kumuh di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh.

Menurut Surat Edaran DJCK No. 40/SE/DC/2016, tentang pedoman umum program KOTAKU menjelaskan adanya 4 tahap yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan penataan kawasan kumuh, yaitu :

1. Tahap Sosialisasi Kepada Masyarakat setempat Program KOTAKU di Desa Koto Baru

Menurut George C. Erward dalam Agustino (2016) komunikasi menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten dalam masyarakat.

Sosialisasi diperlukan untuk memberi gambaran serta pemahaman kepada masyarakat agar capaian program berjalan dengan efektif. Persiapan pada pelaksanaan program KOTAKU diawali dengan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat daerah tersebut, yaitu memberi pemahaman tentang pengertian kumuh dan program yang akan di implementasikan.

Seperti dipahami bersama bahwa langkah sosialisasi dimaksudkan untuk memasyarakatkan program, kemudian mengkomunikasikan program yang dijalankan kepada masyarakat kelompok sasaran sehingga langkah ini dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan maupun pemeliharaan infrastruktur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa *key informan* Sosialisasi di Desa Koto Baru dilakukan oleh kepala desa yaitu bapak Petriadi dan staf desa di Kantor Desa Koto Baru. Materi sosialisasi yang disampaikan yaitu terkait dengan program KOTAKU yang bertujuan untuk memberi gambaran program yang akan dilakukan dalam setiap rangkaian dan teknis pelaksanaan program yang dilalui dengan 4 tahapan utama yaitu : Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi. Dari seluruh tahapan sosialisasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi berjalan dengan lancar dan telah diketahui oleh pengurus rt/rw, namun pada kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang belum tersentuh oleh sosialisasi dari program ini.

2.Tahap Perencanaan Program KOTAKU di Desa Koto Baru

Perencanaan dalam program kota tanpa kumuh ditempuh dengan pelibatan dari berbagai pihak baik dari sisi pelaku maupun penerima manfaat (masyarakat). Dengan metode seperti itu diharapkan semua rencana yang dihasilkan dapat mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat, selain itu dapat pula digunakan untuk menyiapkan dukungan dari masyarakat saat program ini dilaksanakan. Konsep perencanaan program adalah menyusun pemecahan masalah bersama dan membangun komitmen pemangku kepentingan dalam penanganan permukiman kumuh.

Berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Desa Koto Baru, secara umum dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di Desa Koto Baru adalah :

1. Jalan Lingkungan
2. Drainase Lingkungan

Hasil musyawarah masyarakat Desa Koto Baru juga menekankan agar konstruksi dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan ketentuan pemerintah, hal ini diharapkan agar pengerjaannya tidak asal-asalan sehingga mutu dari proyek yang dibangun akan bertahan lama.

3.Tahap Pelaksanaan Program KOTAKU di Desa Koto Baru

Pelaksanaan kegiatan program KOTAKU merupakan tahap pelaksanaan seluruh rencana yang menjadi prioritas yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa. Tahap pelaksanaan ini baik kegiatan sosial, kegiatan ekonomi maupun kegiatan infrastruktur di Desa Koto Baru

sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen rencana penanganan pemukiman kumuh dimana yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.

Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan prioritas penanganan lingkungan baik skala kota maupun skala lingkungan yang sudah di koordinasikan

Sesuai dengan hasil musyawarah masyarakat Desa Koto Baru, dimana prioritas rencana pengerjaan proyek tersebut adalah drainase lingkungan dan jalan lingkungan.

Selain itu, partisipasi dan respon masyarakat terhadap program KOTAKU juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menghambat pelaksanaan program yang telah direncanakan sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang didapatkan dari seluruh informan, maka dapat disimpulkan bahwa Konsep pelaksanaan program ini adalah implementasi kegiatan program KOTAKU sesuai dengan rencana yang disusun dalam dokumen perencanaan perkotaan. Adapun program yang telah disusun yaitu, proyek pembangunan drainase dan jalan hal lingkungan, hal ini mempertimbangkan sesuai dengan kondisi lingkungan yang dibutuhkan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat juga sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan rencana yang telah disusun, sejauh ini masyarakat telah berpartisipasi dalam pelaksanaannya, baik partisipasi dalam bentuk tenaga, fikiran, dan finansial. Namun ada sebagian warga yang tidak ikut berpartisipasi dikarenakan alasan lainnya.

4. Tahap Evaluasi Program KOTAKU di Desa Koto Baru

Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), evaluasi dimaknai sebagai kegiatan melakukan pengamatan perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sudah terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara terbuka, setiap masyarakat boleh menghadiri ketika diadakan rapat evaluasi. Selain itu juga semakin sering masyarakat ikut serta dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Tahap evaluasi selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa yaitu membahas tentang pertanggung jawaban penggunaan dana pembangunan untuk pelaksanaan kegiatan fisik, pembahasan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur, penyerahan seluruh dokumen dan laporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Desa Koto Baru Kec. Koto Baru Kota Sungai Penuh sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan awal dan masyarakat desa Koto Baru juga sudah ikut berpartisipasi dalam proses pembanguna drainase lingkungan dan jalan lingkungan, hanya saja dengan berjalan nya waktu tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga pembangunan tersebut sudah mulai berkurang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan, secara umum dapat di simpulkan bahwa:

1. Tahap sosialisasi bertujuan untuk memberi gambaran program yang akan dilakukan dalam setiap rangkaian dan tekhnis pelaksanaan program yang dilalui dengan 4 tahapan utama yaitu : Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi. Dari seluruh tahapan sosialisasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, sosialiasi berjalan dengan lancar dan

- telah diketahui oleh pengurus rt/rw, namun pada kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang belum tersentuh oleh sosialisasi dari program ini.
2. Tahap perencanaan di lakukan dengan melibatkan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang ada di desa koto baru maka di sepakati prioritas pembangunannya adalah jalan lingkungan dan drainase lingkungan.
 3. Tahap pelaksanaan program KOTAKU sudah sesuai dengan rencana yang disusun dalam dokumen perencanaan perkotaan. Adapun program yang telah disusun yaitu, proyek pembangunan drainase dan jalan hal lingkungan, hal ini mempertimbangkan sesuai dengan kondisi lingkungan yang dibutuhkan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat juga sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan rencana yang telah disusun, sejauh ini masyarakat telah berpartisipasi dalam pelaksanaannya, baik partisipasi dalam bentuk tenaga, pikiran, dan finansial. Namun ada sebagian warga yang tidak ikut berpartisipasi dikarenakan alasan lainnya.
 4. Tahap Evaluasi di mana sudah sesuai dengan perencanaan awal dan masyarakat desa Koto Baru juga sudah ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan drainase lingkungan dan jalan lingkungan, hanya saja dengan berjalannya waktu tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga pembangunan tersebut sudah mulai berkurang.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Di ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Graha Ilmu : Yogyakarta
- Apriliana, sahria. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Tentang Program Pembangunan Drainase dan Sanitasi Di Kelurahan Tertip Kota Balikpapan) journal Administrasi Negara. Volume 6, Nomor 1, 2018. Balikpapan. Universitas Mulawarman.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Bhatari, A. M, 2018. Implementasi Program KOTAKU : Studikusus di Kendari. Program studi administrasi public. Pasca sarjana universitas halu oleo.
- Deleon. 2001. *policy formulation: design and tools dalam frishcer frank, el at(ed). (2001). Handbook of public policy, analysis theory, politics, and methods. CRC press. Boca Raton network: bandung Alfabeta cv*
- Kuswartojo, Tjuk 2005. *Perumahan dan permukiman di Indonesia, upaya membuat perkembangan kehidupan yang berkelanjutan*. Bandung : ITB
- Lamsi, 2019. Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Peningkatan Dan Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Tahun 2019) : Universitas Lampung. Lampung

- Moleong,lexy J. 2011. Metodologi penelitian kualitatif. Remajarosda karya
- Muhtar,dkk. 2012 Rapid Assisment daerah aliran sungai ciliwung di kelurahan manggarai, Jakarta : P3ks press (Anggota IKAPI) Nasional
- Nurhasanah, 2019. Implementasi Kebijakan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat : Universitas Islam Malang, Jawa Timur Peraturan Menti PUPR Nomor 15 Tahun 2015 tentang strategi pelaksanaan kebijakan implementasi percepatan penanganan kumuh 2016-2019. Persada
- Solichin abdul wahab .2008. *pengantar analisis kebijakan*. Malang : UMM Press
- Sugiyono,2016. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. dan R&D. Bandung
- Surat Edaran No 40/Se/Dc/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
- Sopiatno, B. (2015). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekan baru Tahun 2011-2013. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*
- SK Walikota Sungai Penuh Nomor 051/Kep.447/2016 Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Sungai Penuh.
- Suman, Agus.(2006). Pemberdayaan Perempuan, Kredit Mikro, dan Kemiskinan :Sebuah Studi Empiris.” Diakses melalui <http://www.petra.ac.id>
- Tachjan. 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Tresiana, Novita 2013 Hal 115. Metode Penelitian Kualitatif. Lembaga Penelitian Universitas Lampung : Bandar lampung
- Usman,Nuridin. 2002. Konteks implementasi kurikulum. Bandung: CV. Citra Malang Undang- undang Nomor 01 tahun 2011 Tentang Purumahan Dan Permukiman
- Van metter, D.S and C.E van horn. 1978. The policy implementation process : A
- Wibawa, Samudra, dkk. 1994. *Evaluasi kebijakan publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Widodo,joko. 2001. Etika birokrasi dalam pelayanan public. Malang: CV. Citra Malang